

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH



BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI TAHUN 2010-2015



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dann Tujuan..... 5

1.4 Sistimatika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 13

2.2 Sumberdaya BPMD dan PPT Provinsi Jambi 26

2.3 Kinerja Pelayanan 30

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMD & PPT
Provinsi 36

BAB III ISU STRATEGIS BERKAITAN TUGAS POKOK
DAN FUNGSI BPMD DAN PPT PROVINSI JAMBI

3.1 Identifikasi Permasalahan 43

3.2 Tela’ah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah..... 49

3.3 Tela’ah Renstra K/L..... 54

3.4 Tela’ah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana
Tata Ruang Wilayah 57

3.5 Penentuan Isu Strategis 60

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS
DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi 61

4.2 Tujuan dan Sasaran 62

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan 67

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

5.1 Program dan Kegiatan Pokok..... 70

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif..... 81

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

A. Strategi.....	42
B. Kebijakan.....	43
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	45
A. Program dan Kegiatan Pokok.....	45
B. Program dan Kegiatan Lintas SKPD.....	47
C. Program dan Kegiatan Kewilayahan.....	48
BAB VII. INDIKATOR KINERJA BPMD dan PPT.....	50
BAB VIII. PENUTUP.....	52

SAMBUTAN

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkah, Rahmat dan izin-nya penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMD dan PPT) ini dapat diselesaikan.

Kita menyadari bahwa pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri menekankan bahwa daerah harus mampu membiayai jalannya roda pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dan pembangunan yang berbasis pada kemampuan mengelola dan mendayagunakan potensi yang dimiliki, bagi daerah yang memiliki kemampuan tinggi, permasalahan ini bukanlah halangan dalam pembangunan daerahnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah bagi daerah yang mempunyai SDM yang terbatas, sedangkan potensi daerahnya sangat memungkinkan untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Beragam upaya dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan. Langkah kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi sampai pemberian kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah yang kesemuanya berakhir pada peningkatan penerimaan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan.

Atas dasar itu, saya menyambut gembira terbitnya Buku Rencana Strategis ini dengan harapan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin khususnya dalam mengundang investor untuk dapat menginvestasikan modalnya di daerah Jambi dengan berbagai kegiatan yang memungkinkan. Buku ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana upaya dan strategi kita dalam meningkatkan investasi di Provinsi Jambi. Buku ini mengajak kita semua untuk berfikir positif tentang program pengembangan investasi di Provinsi Jambi. Semoga dengan terbitnya buku ini, dapat membantu kita semua untuk berkarya dalam menangani masalah peningkatan investasi di Provinsi Jambi.

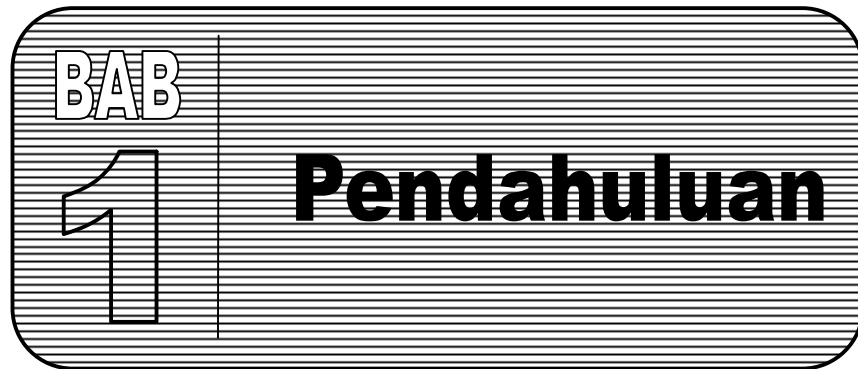
Jambi, Januari 2013

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI

H. HEFNI ZEN, SH. MM

Pembina Utama Madya

NIP. 19570721 198503 1 003



BAB 1 Pendahuluan

1.1. Latar Belakang.

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi Pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (*public service*), Fungsi Pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektorpembangunan (*development function*), dan Fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (*regulation and function*), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan public yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan *public good*, seperti jalan, jembatan, pasar dan lainlain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang

berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi pasal 21 yang menyebutkan bahwa, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi Tahun 2010 - 2015 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang.

Perencanaan Strategis berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD untuk setiap unit kerja daerah, yang memuat Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi.

menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya.

Fokus dari perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Renstra Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan dan penanaman modal di kota masyarakat yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap akhir tahun.

Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor asing ke daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memberikan insentif kepada investor. Salah satu strategi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan cara memberikan keringanan pajak, menjamin keamanan, serta memberikan kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi. Untuk memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan maka dapat dilakukan melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan cara seperti ini para investor tidak lagi perlu untuk mengurus dengan mendatangi kantor-kantor yang berbeda dan terpisah.

Sebagai salah satu provinsi yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang, Provinsi Jambi pun berupaya untuk menarik para investor. Selama ini wujud nyata dari upaya tersebut ditunjukkan oleh gencarnya upaya promosi yang dilakukan oleh Pemerintah provinsi baik dalam mengikuti pameran di berbagai daerah

dan berkunjung ke luar negeri untuk mempromosikan potensi investasi Provinsi Jambi. Keseriusan pemerintah daerah juga ditunjukkan dengan terus meningkatnya anggaran yang digunakan untuk promosi dari tahun ke tahun. Berbagai faktor yang telah dijelaskan diatas merupakan dasar yang akan ditempuh BPMD & PPT Provinsi Jambi dalam upaya mencapai visi dan misi Provinsi Jambi 2015.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis BPMD dan PPT Provinsi Jambi tahun 2010-2015 ini diantaranya adalah :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional 2005-2025.
4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJM Nasional 2010-2014.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025.

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010 – 2015.
9. Visi dan misi Gubernur terpilih 2010-2015

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah BPMD dan PPT Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 untuk memberikan arahan landasan kebijakan taktis strategi lima tahunan (2010-2015), dan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian visi sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran pada setiap akhir tahun.

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang strategis selama lima tahun yang merupakan pedoman dalam pencapaian visi BPMD dan PPT (2010-2015) melalui sumber pembiayaan APBD.

1.4. Sistematika Penulisan Rencana Strategis.

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah BPMD dan PPT Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPMD dan PPT, memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

BAB III. ISU STRATEGIS BERKAITAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPMD dan PPT, memuat tentang hasil Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Penentuan Isu-isu Strategis.

Identifikasi dan Analisis Kekuatan, Identifikasi dan Analisis Kelemahan, selanjutnya hasil Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal, Identifikasi dan Analisis Peluang, Identifikasi dan Analisis Ancaman.

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN, memuat tentang Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan BPMD dan PPT tahun 2010-2015.

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF, memuat tentang Program dan Kegiatan Pokok BPMD dan PPT Provinsi Jambi, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, serta Pendanaan Indikatif dalam Kurun waktu 2010-2015.

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BPMD dan PPT PROVINSI JAMBI YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD, memuat tentang Indikator Kinerja BPMD dan PPT Provinsi Jambi tahun 2010-2015

yang secara langsung menunjukan capaian kinerja dalam 5 tahun mendatang.

BAB VII. PENUTUP.

BAB 2	GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPMD DAN PPT PROVINSI JAMBI
------------------------	--

Dalam kurun waktu 2006 s/d 2009 perkembangan perekonomian Provinsi Jambi cukup mengembirakan dimana pertumbuhan ekonomi dari 5,89 persen pada tahun 2006 menjadi 6,38 persen di tahun 2009. Angka pertumbuhan tertinggi dicapai Provinsi Jambi terjadi pada tahun 2008, yaitu 7,16 persen dan Provinsi Jambi juga berada pada peringkat tujuh nasional dan tertinggi di pulau Sumatera, sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi lima tahun terakhir tetap di atas rata-rata nasional.

Peningkatan kegiatan ekonomi yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,56 persen per tahun, juga telah mendorong pertumbuhan lapangan kerja rata-rata 4,47 persen per tahun selama kurun waktu 2006-2009. Pertumbuhan ekonomi telah mengurangi angka pengangguran dari 143.857 orang di tahun 2006 menjadi 94.703 orang di tahun 2009. Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) dari Rp. 563.000,- di tahun 2006 menjadi Rp. 800.000 di tahun 2009.

Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Perkembangan investasi di Provinsi Jambi selama kurun waktu 2005 – 2009 dinilai cukup memadai. Sebagai gambaran mengenai perkembangan rencana investasi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang beroperasi di Provinsi Jambi menurut sektor bidang usaha disajikan pada Tabel 1.

Tabel .1 Perkembangan Rencana Investasi Perusahaan PMDN dirinci menurut sektor di Provinsi Jambi Tahun 2005-2009

PERUSAHAAN PMDN						
No	Sektor	RENCANA I N V E S T A S I (DALAM RP. JUTA)				
		Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Perkebunan	4,885,935.20	5,213,144.20	5,213,687.90	5,650,266.00	5,650,266.00
2	Kehutanan	597,199.39	597,199.39	609,486.49	597,199.39	597,199.39
3	Industri Perakayuan	2,772,946.97	2,772,946.97	1,251,793.15	1,251,793.15	1,251,793.15
4	Industri Kimia	443,074.30	443,074.30	503,074.30	864,323.60	864,323.60
5	Ind.Pengolahan Klp.Sawit	506,615.12	506,615.12	557,813.94	812,097.31	812,097.31
6	Industri Makanan	790,263.80	790,263.80	790,263.80	489,105.28	489,105.28
7	Industri Pulp	19,176,148.15	19,176,148.15	19,176,148.15	19,176,148.15	19,176,148
8	Industri Logam Dasar	36,900.00	36,900.00	36,900.00	35,900.00	35,900.00
9	Industri Kapal Kayu	50,882.34	50,882.34	50,882.34	50,882.34	50,882.34
10	Industri Minyak Pelumas	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11	Angkutan	1,660.00	1,660.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
12	Parpostel	77,251.50	77,251.50	77,251.50	77,251.50	77,251.50
13	Pertamabangan & Energi	301,128.06	301,128.06	425,051.74	396,887.43	396,887.43
14	Real Estate	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
15	Jasa pertambangan		507,000.00	507,000.00	20,000.00	20,000.00
	Jumlah	29,700,754.83	30,534,963.83	29,261,703.31	29,484,204.15	29,484,204.15

Sumber : BKPMD Provinsi Jambi, 2010

Seperti terlihat pada Tabel 1, bahwa sektor perkebunan, industri kimia dan industri pengolahan kelapa sawit cenderung mengalami peningkatan. Untuk sektor kehutanan, industri pulp, industri logam dasar, industri kapal kayu, industri minyak pelumas, pariwisata pos dan telekomunikasi dan angkutan tetap atau konstan, sedangkan industri perakayuan dan industri makanan mengalami penurunan.

Perkembangan rencana investasi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang beroperasi di Provinsi Jambi menurut sektor bidang usaha seperti disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3. Rencana PMA di Provinsi Jambi dapat dibagi dalam 2 bentuk yaitu PMA dalam bentuk Rupiah dan

PMA dalam bentuk Dollar Amerika Serikat. Rencana investasi PMA dalam bentuk rupiah selama tahun 2005-2009 untuk sektor perkebunan, industri perkayuan dan industri pengolahan kelapa sawit cenderung terjadi peningkatan, sedangkan untuk sektor jasa tidak bertambah atau konstan. Untuk rencana investasi PMA dalam bentuk US \$ selama tahun 2005-2009 sektor yang mengalami peningkatan adalah perkebunan, Hutan Tanaman Industri, industri perkayuan, pertambangan dan jasa.

Tabel .2 Perkembangan Rencana Investasi Perusahaan PMA (dalam Juta rupiah) dirinci menurut sektor di Provinsi Jambi Tahun 2005-2009

PERUSAHAAN PMA						
No	Sektor	RENCANA I N V E S T A S I (D A L A M R P. J U T A)				
		Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Perkebunan	1,348,677.00	1,404,677.00	1,548,677.00	3,744,996.75	3,744,996.65
3	Industri Perkayuan	4,873.28	4,873.28	413,276.76	494,238.65	894,238.65
4	Industri Kimia	93,700.00	93,700.00	324,850.00	44,500.00	69,500.00
6	Parpostel	45,391.87	45,391.87	-	6,437.00	6,437.00
7	Pertambangan & Energi	895,635.00	895,635.00	895,635.00	20,050.00	20,050.00
8	Ind.Peng.Kelapa Sawit	113,703.00	113,703.00	225,705.00	281,703.00	281,703.00
9	Jasa	65,655.00	65,655.00	65,655.00	65,607.00	65,607.00
	Jumlah	2,567,635.15	2,623,635.15	3,473,798.76	4,657,532.40	5,082,532.30

Sumber : BKPM Provinsi Jambi, 2010

Lokasi usaha perusahaan PMDN dan PMA tersebut tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi selain Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Sampai saat ini Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh belum ada investasi PMDN dan PMA. Daerah ini sesungguhnya cukup potensial untuk dikembangkan, peluang investasi yang dimiliki oleh daerah ini cukup beragam. Hampir semua sektor memiliki prospek yang cukup menjanjikan dan siap menunggu masuknya investasi. Beberapa peluang tersebut diantaranya terdapat di sektor pertanian, pengolahan hasil

pertanian, pariwisata, perikanan, dan lain sebagainya. Namun demikian, faktor keterbatasan infrastruktur yaitu prasarana dan sarana transportasi menyebabkan daerah ini kurang diminati investor.

Tabel .3 Perkembangan Rencana Investasi Perusahaan PMA (dalam ribu US.\$) dirinci menurut sektor di Provinsi Jambi Tahun 2005-2009

PERUSAHAAN PMA						
No	Sektor	RENCANA I N V E S T A S I (D A L A M R I B U U S . \$)				
		Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
1	Perkebunan	450,458.40	450,458.40	450,461.40	850,458.40	850,458.40
2	H T I	4,000.00	7,500.00	3,500.00	7,500.00	7,500.00
3	Industri Perakayuan	11,979.88	11,979.88	11,979.88	22,279.88	24,479.88
4	Industri Kimia	2,181.90	2,181.90	1,581.90	49,581.90	49,581.90
5	Industri Makanan	-	13,500.00	13,350.00	14,150.00	14,150.00
6	Parpostel	24,262.43	24,262.43	-	-	-
7	Pertambangan & Energi	773,264.74	773,264.74	773,264.74	1,773,217.76	1,773,217.76
8	Industri Sepeda Motor	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
9	Jasa	237.00	692.00	38,215.00	239,356.91	246,556.91
	Jumlah	1,271,884.35	1,289,339.35	1,297,852.92	2,962,044.85	2,971,444.85

Sumber : BKPMD Provinsi Jambi, 2010

Perkembangan realisasi investasi perusahaan PMDN mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2006 realisasi total mencapai Rp.9,128 triliun akan tetapi pada tahun 2009 menurun menjadi Rp.9,05 triliun hal ini disebabkan karena ada perusahaan PMDN yang beralih status ke PMA selain itu adanya pengaruh krisis keuangan global serta banyaknya industri di sektor perakayuan yang macet/tutup karena kesulitan bahan baku. Untuk nilai realisasi investasi PMA yang menggunakan dana rupiah terjadi peningkatan dari total Rp.1,12 triliun tahun 2006 menjadi Rp.2,21 triliun tahun 2009. Sedangkan investasi PMA dalam dolar Amerika Serikat juga terjadi peningkatan dimana tahun 2006 sebesar US \$ 18,23 juta meningkat menjadi US \$ 20,65 juta pada tahun 2009.

Secara umum daerah menyadari bahwa untuk mempercepat proses pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema yang cukup rumit. Di satu sisi terdapat keinginan untuk membangun dengan menggunakan kemampuan sendiri tanpa harus bergantung kepada pihak lain. Di sisi lain, sebagian besar daerah mengalami keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan pembangunannya. Sumber pendanaan yang secara kasat mata bisa menjadi alternatif untuk mewujudkan visi dan misi daerah adalah dengan menarik investasi baik domestik maupun asing.

Otonomi daerah di satu sisi telah memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Namun demikian, peluang tersebut telah pula menciptakan persaingan yang semakin tajam antar daerah dalam menarik investasi ke daerah masing-masing. Persaingan yang sehat mengharuskan pemerintah daerah untuk menyiapkan segala kebutuhan publik yang terbaik sehingga mampu menarik investasi, orang dan industri untuk masuk ke wilayah masing-masing.

Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor asing ke daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Strategi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain memberikan insentif kepada investor. Salah satu strategi yang memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan cara memberikan keringanan pajak, menjamin keamanan, serta memberikan kemudahan serta memperpendek jalur birokrasi untuk pengurusan izin investasi. Untuk memperpendek jalur birokrasi dan mempermudah urusan maka dapat dilakukan melalui sistem pelayanan satu pintu. Dengan cara seperti ini para investor tidak lagi perlu untuk mengurus dengan mendatangi kantor-kantor yang berbeda dan terpisah.

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008 pada pasal 120 menjelaskan tugas dan fungsi dari pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jambi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPMD DAN PPT Provinsi Jambi tersebut maka ada beberapa jenis pelayanan yang dapat diberikan yaitu :

2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BPMD dan PPT Provinsi Jambi.

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal Daerah (Pasal 120 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2008). Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal Daerah;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal Daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal Daerah dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Jambi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEPALA

Kepala Badan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 120 Pergub No.31 Tahun 2008;

- b. Memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

SEKRETARIAT

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, administrasi umum dan tatalaksana, perencanaan, pengelolaan urusan keuangan, Kepegawaian, hukum dan hubungan kemasyarakatan serta urusan rumah tangga.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan;
 - b. Memberikan pelayanan administratif;
 - c. Melaksanakan administrasi keuangan, kepegawaian dan ketatausahaan serta urusan rumah tangga;
 - d. Melaksanakan urusan Organisasi dan Ketatalaksanaan, Dokumentasi, Perundang- undangan, serta Analisis Jabatan;
 - e. Melaksanakan Urusan Protokol, Humas dan rumah tangga;
 - f. Melaporkan dan mengevaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sekretariat; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai kewenangannya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan kegiatan administrasi perkantoran, kepegawaian dan rumah tangga. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Membantu menyiapkan bahan pengelolaan pengadministrasian perkantoran.
- b. Membantu menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dan protokol;
- c. Membantu menyiapkan bahan pengelolaan administrasi Kepegawaian;
- d. Membantu mengumpulkan bahan pengelolaan kegiatan analisis jabatan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasannya; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Membantu mengumpulkan bahan perencanaan kabutuhan anggaran;
- b. Membantu menyusun kegiatan administrasi keuangan;
- c. Membantu menyiapkan bahan laporan pelaksanaan anggaran;

- d. Membantu menghimpun daftar transaksi, dokumen keuangan, jurnal,
- e. serta melakukan pemeriksaan atas kelengkapannya;
- f. Membantu menghimpun bahan peraturan perundang-undangan dibidang keuangan;
- g. Membantu menyiapkan bahan Monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan kewenangannya.

Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja badan. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Membantu mengumpulkan bahan penyusunan program kegiatan;
- b. Membantu mengumpulkan bahan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program penanaman modal;
- c. Membantu menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
- d. Membantu menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan program serta laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja;
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasannya;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

BIDANG PENGEMBANGAN DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL.

Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai tugas menyusun, mengolah dan merumuskan data dan sistem informasi, serta mengoordinasikan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal serta memfasilitasi kerjasama dunia usaha di bidang pengembangan penanaman modal daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang sistem informasi penanaman modal terhadap instansi penanaman modal Kabupaten / Kota;
- b. Mengoordinasikan kerjasama penanaman modal secara terpadu sesuai dengan kebijaksanaan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kemitraan dunia usaha dan lembaga dalam rangka pengembangan penanaman modal;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Sub Bidang Data dan Informasi penanaman Modal

Sub Bidang Data dan informasi Penanaman Modal mempunyai tugas membantu melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan evaluasi data dan potensi daerah serta mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi Penanaman Modal Pemerintah Pusat dan Kabupaten / Kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Data dan Informasi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Membantu mengumpulkan, menyiapkan dan mengolah data potensi daerah dan sarana prasarana penunjang dalam rangka penanaman modal yang akan ditawarkan kepada investor;
- b. Membantu menyiapkan bahan evaluasi potensi dan bahan masukan / usulan, saran dalam rangka menarik investor melakukan penanaman modal
- c. Membantu menyiapkan bahan koordinasi hasil penyusunan data potensi daerah dengan kabupaten / kota dalam rangka penanaman modal;
- d. Membantu menyiapkan bahan pemberian pelayanan informasi kepada calon investor dalam rangka penanaman modal di daerah;
- e. Membantu menyiapkan bahan penyusunan pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasannya;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal

Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas menyiapkan bahan usulan materi dan fasilitasi kerjasama dunia usaha serta pendidikan dan pelatihan di bidang Penanaman Modal dalam rangka pengembangan Penanaman Modal.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan kerja sama dunia usaha dan lembaga dalam rangka peningkatan dan pengembangan Penanaman Modal;
- b. Menyiapkan usulan materi dan fasilitasi kerjasama internasional di bidang Penanaman Modal;
- c. Menyiapkan dan memfasilitasi pertemuan dunia usaha dan lembaga dalam rangka keterpaduan kegiatan Penanaman Modal;
- d. Memfasilitasi kegiatan kemitraan usaha pengusaha kecil, menengah dan besar dalam rangka pengembangan Penanaman Modal;
- e. Mengkoordinasikan Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan perencanaan serta pelaksanaan Penanaman Modal;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan

BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL

Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan materi promosi serta melaksanakan mengkoordinasikan kegiatan promosi penanaman modal daerah, baik di dalam maupun ke luar negeri yang melibatkan Kabupaten / kota.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Mengkoordinasikan materi promosi dalam rangka penanaman modal daerah melibatkan Kabupaten / kota;
- b. Menyiapkan bahan-bahan untuk promosi;

- c. Menyusun jadwal promosi dalam negeri maupun luar negeri bersama instansi terkait dan Kabupaten / Kota.
- d. Mendistribusikan dan menyebarluaskan bahan atau materi promosi dalam bentuk audio visual, media cetak dan media elektronik
- e. Mensinergikan data potensi dan jadwal promosi dengan Kabupaten / Kota;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasannya;
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya

Sub Bidang Materi Promosi

Sub Bidang Materi Promosi mempunyai tugas membantu menyiapkan bahan-bahan dan atau materi promosi dan kebijakan-kebijakan investasi serta menginventarisir keunggulan-keunggulan produk-produk daerah dan potensi / peluang investasi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Materi Promosi mempunyai Fungsi :

- a. Membantu menyiapkan bahan-bahan materi promosi ke dalam bentuk audio visual, media cetak dan media informasi seperti leaflet, booklet, banner dsb;
- b. Membantu mengumpulkan dan menginventarisir data dan kebijakan-kebijakan serta potensi / peluang investasi di daerah;
- c. Membantu menyiapkan dan menyusun serta mengolah data investasi secara akurat untuk dimuat ke dalam media informasi promosi website;

- d. Membantu menyiapkan bahan-bahan promosi sampel-sampel potensi dan produk unggulan dari dinas instansi serta Kabupaten/Kota sekaligus membuat spesifikasi keunggulan produk;
- e. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasannya;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

Sub Bidang Pelaksanaan Promosi

Sub Bidang Pelaksanaan Promosi mempunyai tugas membantu menginventarisir, menjadwalkan dan mengikuti Event Pelaksanaan promosi baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Sub Bidang pelaksanaan Promosi mempunyai fungsi :

- a. Membantu menginventarisir event-event promosi di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. Membantu menyiapkan, menyusun dan menjadwalkan pola-pola pelaksanaan promosi;
- c. Membantu menghimpun informasi dari pemodal luar negeri maupun dalam negeri yang berminat menanamkan modalnya di daerah;
- d. Membantu menginventarisir pasar dan calon investor yang potensial di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. Membantu menyebarluaskan bahan promosi kepada calon investor;
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

BIDANG PELAYANAN PERIZINAN

Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai tugas meneliti, menilai dan menyiapkan bahan pertimbangan pemberian penerbitan perizinan dalam rangka kegiatan penanaman modal di daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai fungsi :

- a. Mengkaji dan meneliti serta mempertimbangkan usulan pemberian penerbitan perizinan dan non perizinan dalam rangka kegiatan penanaman modal pada sektor primer, sekunder dan tersier di daerah;
- b. Menyiapkan bahan-bahan regulasi dan deregulasi di bidang Penanaman Modal di Daerah;
- c. Mengoordinasikan pembinaan pelayanan terpadu satu pintu diprovinsi dan Kabupaten / Kota;
- d. Memberikan penilaian permohonan Perizinan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan Penanaman Modal yang berlokasi di Provinsi Jambi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

- a. Melakukan Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Penanaman Modal yang telah memperoleh Persetujuan Pemerintah Daerah.
- b. Melakukan pengawasan dan pembinaan atas penggunaan fasilitas yang dimanfaatkan bagi Penanaman Modal;
- c. Menampung dan memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal di Daerah;
- d. Mempelajari dan menelaah Peraturan perundang-undangan Penanaman Modal guna menyusun program kerja Bidang Pengendalian dan Pengawasan serta pembinaan Penanaman Modal;
- e. Melakukan evaluasi atas laporan kegiatan Penanaman Modal;
- f. Menyiapkan laporan Penanaman Modal untuk kepentingan Pembangunan Daerah.

Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal

Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu melaksanakan Pembinaan perusahaan Penanaman Modal dan evaluasi terhadap laporan kegiatan penanaman modal serta melakukan penelitian terhadap kebenaran laporan yang disampaikan oleh para investor / perusahaan dan BUMD.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pembinaan Penanaman Modal mempunyai fungsi ;

- a. Membantu menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal yang telah memperoleh Persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;

- b. Membantu menghimpun laporan-laporan yang disampaikan oleh penanam modal tentang LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal);
- c. Membantu melakukan evaluasi laporan produksi dan ekspor yang dilakukan oleh Investor dan Kegiatan PMA dan PMDN;
- d. Membuat laporan realisasi perkembangan perusahaan PMA dan PMDN;
- e. Memberikan bimbingan teknis tentang pengisian LKPM kepada perusahaan PMA / PMDN;
- f. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal

Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas membantu melaksanakan pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap perusahaan / investor yang melakukan penanaman modal di daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi ;

- a. Membantu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Provinsi;
- b. Membantu menyiapkan bahan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Penanaman Modal yang telah memperoleh Persetujuan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
- c. Membantu menginventarisir, menganalisa dan memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang timbul terhadap pelaksanaan penanaman modal di daerah;

- d. Membantu memberikan pelayanan terhadap para investor untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan usahanya;
- e. Membuat dan menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan dan Pengendalian Investasi;
- f. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

Struktur Organisasi BPMD dan PPT.

Berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 sebagai implementasi PP Nomor. 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Susunan Organisasi BPMD dan PPT Provinsi Jambi (lihat lampiran) terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1.Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2.Subbagian Keuangan dan Aset;
 - 3.Subbagian Program.
- c. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Penanaman Modal terdiri dari:
 - 1.Subbidang Data dan Informasi Penanaman Modal;
 - 2.Subbidang Pengembangan Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1.Subbidang Materi Promosi;
 - 2.Subbidang Pelaksanaan Promosi.
- e. Bidang Pelayanan Penanaman Modal terdiri dari :
 - Tim Teknis

f. Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penanaman Modal terdiri dari:

- 1.Subbidang Pembinaan Penanaman Modal;
- 2.Subbidang Pengendalian Penanaman Modal.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Sumber Daya BPMD & PPT Provinsi Jambi

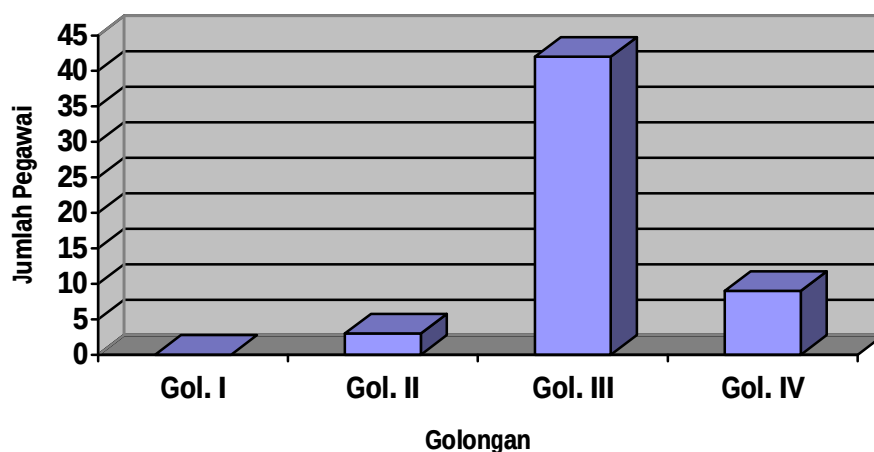
2.2.1 Sumber Daya Aparatur

Susunan kepegawaian pada BPMD dan PPT Provinsi Jambi tahun 2010 sebagaimana tersaji pada tabel & Grafik berikut ini.

Tabel .4. KOMPOSISI PNS BPMD & PPT PROVINSI JAMBI TAHUN 2011

No	Jabatan	Eselon			Golongan				Pendidikan						Ket
		IIa	IIIa	IVa	IV	III	II	I	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Kepala	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2	Sekretaris	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
3	Kabid	-	4	-	3	1	-	-	-	1	3	-	-	-	
4	Kasubbid	-	-	6	1	6	-	-	-	2	6	-	-	-	
5	Kasubbag	-	-	3	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	
6	Staf	-	-	-	3	33	3	-	-	4	10	1	13	-	
Jumlah		1	5	9	9	42	3	-	1	8	21	1	13	-	

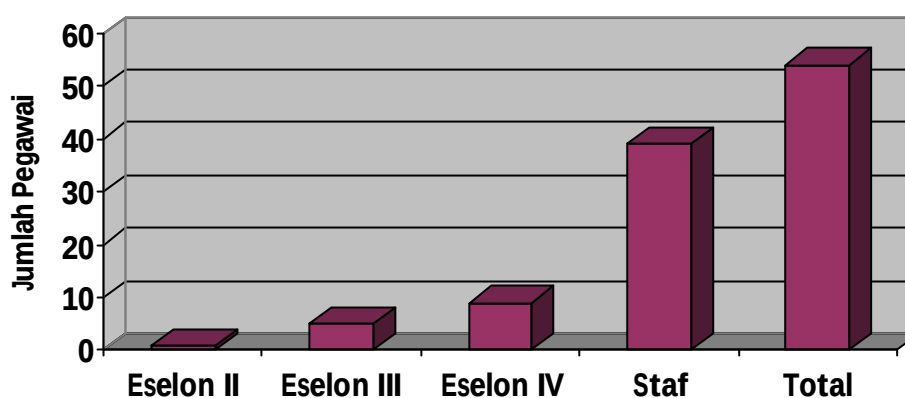
a. Berdasarkan Golongan



Grafik .1 Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan

Dari grafik sumberdaya pegawai berdasarkan golongan diatas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai BPMD & PPT Provinsi Jambi Tahun 2011 adalah Golongan III sebanyak 42 pegawai, untuk Golongan IV sebanyak 9 oran, dan Golongan II sebanyak 3 pegawai.

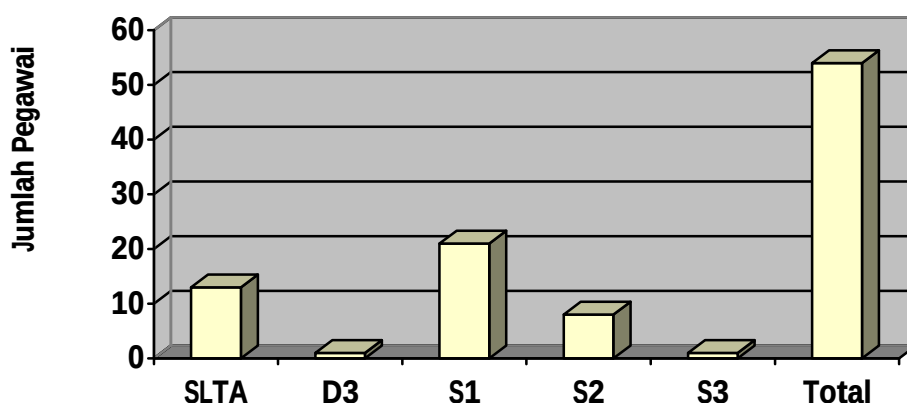
b. Berdasarkan TK Jabatan



Grafik. 2 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan.

Dari gambar terlihat bahwa tingkat jabatan staf yang paling mendominasi yaitu sebanyak 39 orang disusul jabatan eselon IV sebanyak 9 orang eselon III sebanyak 5 orang, dan eselon II sebanyak 1 orang.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Grafik.3 Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Grafik diatas menunjukkan sebagian besar pegawai di BPMD & PPT Provinsi Jambi berpendidikan S1 yaitu sebanyak 21 orang, yang berpendidikan SLTA sebanyak 13 orang, untuk pegawai yang berpendidikan S2 sebanyak 8 orang, dan D3 sebanyak 1 orang, sedangkan yang mencapai S3 sebanyak 1 orang.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia saat ini di BPMD dan PPT Provinsi Jambi guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan antara lain 3 (tiga) unit mobil dan 8 (delapan) unit sepeda motor yang layak pakai, sebagaimana pada table berikut:

Tabel. 5. Sarana dan Prasarana Kerja BPMD dan PPT Provinsi Jambi

No	Jenis/ Merk	Jumlah	Kondisi
1	Mobil : - Avanza - Mitsubishi Kuda - Hilux Single - Kijang Inova	1 Buah 2 Buah 1 Buah 2 Buah	Layak pakai Layak pakai Layak pakai Layak pakai
2	Sepeda Motor : - Honda Supra - Honda Revo - Honda NF 125 TD - Jupiter Z - Jupiter MX-CW	2 Buah 2 Buah 1 Buah 2 Buah 5 Buah	Layak pakai Layak Pakai Layak Pakai Layak pakai Layak pakai

Selain itu untuk mendukung program dan kegiatan lainnya BPMD dan PPT Provinsi Jambi memiliki peralatan kantor antara lain :

Tabel. 6. Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Administrasi BPMD dan PPT Provinsi Jambi

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	Mesin Tik	2	Kurang Baik
2	Komputer	10	Kurang Baik
3	Laptop	9	Kurang Baik
		7	Baik
4	Printer	19	Kurang Baik
		7	Baik
5	Mesin Fax	1	Baik
6	Filling Kabinet	6	Baik
7	AC	15	Baik

2.3 Kinerja Pelayanan BPMD & PPT Provinsi Jambi

Dalam situasi sekarang ini, Badan Penanaman Modal Daerah & Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMD & PPT) Provinsi Jambi, dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMD 2010-2015 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal dan pelayanan perizinan berupa :

- 1). Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi,
- 2). Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi,
- 3). Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah,
- 4). Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

Lahirnya Perpres Nomor 27 Tahun 2009 tentang sistem PTSP di bidang penanaman modal pada Juni 2009 diharapkan dapat memecahkan persoalan seputar tidak efisiennya pelayanan penanaman modal, dan secara langsung dapat mendorong tercapainya kualitas koordinasi antar instansi dan pemerintah daerah. Seperti dimaklumi, kewenangan BPMD & PPT Provinsi Jambi dalam hal pelayanan ada beberapa Kegiatan, yaitu: Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Dunia Usaha (PMA/PMDN), Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal, Kegiatan Fasilitasi Kemudahan dan Sosialisasi Peraturan Terkait Penanaman Modal, dan Koordinasi Peningkatan Pelayanan Modal.

Guna pengembangan sistem pelayanan yang menjadi kewenangan BPMD & PPT Provinsi Jambi baik segi perangkat keras, peranti lunak, maupun sumberdaya manusia (SDM), perlu diinventarisasi permasalahan pelayanan penanaman modal secara menyeluruh agar indikator kinerja dapat diukur secara tepat dan proporsional. Inventarisasi ini dinilai sangat penting dan mendasar dalam rangka implementasi sistem PTSP sebagai salah satu prioritas dalam melaksanakan RPJMD 2010-2015.

Tabel 7. PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN

No	Jenis Pelayanan	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-					
						2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelayanan Penanaman Modal : - Pelayanan Perizinan - Pelayanan Pengaduan - Pemberian insentif dan kemudahan PM	- Jumlah perizinan dan non perizinan yg telah dikeluarkan	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98%	98%	99%	98%	98%	98%
		- Jumlah pengaduan masyarakat terhadap layanan perizinan	100%	100%	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-	99%	99%	99%
		- Jumlah perusahaan yg mendapatkan insentif dan kemudahan	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100%	100%	-	-	96%	98%	98%	98%
2	Kebijakan Penanaman Modal	Terlaksananya RKPPMD	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	98%	98%	98%	98%	98%
3	Kerjasama Penanaman Modal	Terlaksananya Temu usaha dan Kemitraan antar usaha besar dan kecil	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	98%	98%	98%	98%	98%

Gambaran Umum Pelayanan BPMD dan PPT Provinsi Jambi

4	Promosi Penanaman Modal	- Kegiatan Pameran dan Temu Usaha di Dalam Negeri - Pameran dan Temu Usaha Luar Negeri	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	98%	100%	99%	99%	99%
			100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99%	99%	99%
5	Pengendalian Pelaksanaan PM	Layanan Pelaporan Kegiatan PM secara Online	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	96%	97%	98%	98%	98%
6	Pengelolaan Data dan Sistim Informasi PM	Pembuatan Profile Investasi Daerah	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	98%	98%	98%	98%	98%
7	Pendidikan dan Pelatihan PM	Tersedianya SDM Aparatur yg Memadai	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	95%	97%	99%	99%	99%	99%

Tabel. 8 ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN

(dalam juta rupiah)

No	Jenis Pelayanan	Anggaran Tahun ke-						Realisasi Anggaran Tahun ke-					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Pelayanan Penanaman Modal : - Pelayanan Perizinan - Pelayanan Pengaduan - Pemberian insentif dan kemudahan PM	350	350	350	400	400	400	98%	98%	99%	98%	99%	98%
2	Kebijakan Penanaman Modal - RKPPMD	300	300	300	300	350	350	95%	98%	98%	98%	98%	98%
3	Kerjasama Penanaman Modal - Temu Usaha Kemitraan antara Usaha Kecil dan Besar	300	300	350	350	350	400	96%	98%	98%	98%	98%	98%
4	Promosi Penanaman Modal - Pameran & Temu Usaha LN - Pameran & Temu Usaha DN	850	900	900	900	950	1000	94%	97%	96%	98%	98%	98%
5	Pengendalian Pelaksanaan PM - Kegiatan LKPM	300	300	350	350	350	400	95%	96%	97%	98%	98%	98%

Gambaran Umum Pelayanan BPMD dan PPT Provinsi Jambi

6	Pengelolaan Data dan Sistim Informasi PM - Pembuatan Profile Peluang Investasi Daerah	300	300	350	350	400	450	94%	98%	98%	98%	98%	98%
7	Pendidikan dan Pelatihan PM	200	250	250	300	300	350	95%	97%	99%	99%	99%	99%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMD & PPT Provinsi Jambi.

Pemerintah provinsi Jambi khususnya BPMD dan PPT telah berusaha semaksimal mungkin mendukung program pemerintah provinsi dalam menarik modal swasta, namun demikian minat investasi masuk masih relatif kecil. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh faktor internal.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan penanaman modal di Provinsi Jambi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan suatu analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut.

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

A. Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memacu dan menghambat pelaksanaan penanaman modal di daerah dari sudut faktor internal. Dari sudut faktor internal ini dilakukan analisis terhadap aspek kekuatan dan kelemahan Provinsi Jambi dalam kaitan dengan pelaksanaan penanaman modal di daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

- a) Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dimana sampai tahun 2008 mencapai angka 2,788 juta jiwa dengan angka pertumbuhan berkisar 1,56 % per tahun. Perkembangan tersebut terlihat mempunyai kecenderungan yang tetap pesat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini memberikan indikasi bahwa Provinsi Jambi memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar dan menunjukkan tingginya konsumen atau pangsa pasar.
- b) Letak geografis Provinsi Jambi yang strategis. Provinsi Jambi terletak pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu, pertumbuhan regional IMT-GT (*Indonesia, Malaysia dan Thailand-Growth Triangle*) dan IMS-GT (*Indonesia, Malaysia dan Singapura – Growth Triangle*). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komperatif jika dibandingkan dengan Provinsi Lain.
- c) Forum koordinasi Gubernur se-wilayah Sumatera. Keanggotaan Provinsi Jambi dalam forum Gubernur se-Wilayah Sumatera akan menciptakan suatu kemajuan bagi Provinsi Jambi yang seimbang dan saling mengisi dengan Provinsi lainnya. Dengan adanya forum tersebut, masalah-masalah kebutuhan lintas Provinsi yang tidak dapat ditanggulangi oleh Provinsi yang bersangkutan dengan mudah akan dapat teratasi melalui forum koordinasi gubernur dan ini merupakan suatu kekuatan bagi Provinsi Jambi untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal dan promosi daerah.
- d) Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang (batubara, emas, bentonit) serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk dapat menggerakkan roda pembangunan secara mandiri dan efisien, tentunya diperlukan daya dukung sumber daya alam yang memadai. Sumber daya alam ini

akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi.

Identifikasi dan Analisis Kelemahan

- a) Kurangnya sumber dana pembangunan. Salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah daerah harus mampu membiayai jalannya roda pembangunan. Tidak jarang berbagai program penanaman modal di daerah yang telah disepakati tidak dapat berjalan atau terealisasi secara simultan dan terpadu karena keterbatasan anggaran pembangunan.
- b) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai tingkat produktivitas tinggi. Harus diakui bahwa sumber daya manusia yang ada di Provinsi Jambi masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari 75 persen penduduk berusia 10 tahun ke atas berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar. Kondisi ini sering menjadikan para pelaku ekonomi daerah maupun investor asing terpaksa mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari daerah lain bahkan dari luar negeri untuk dapat mengisi kebutuhan dan kekosongan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini sering memicu kerawanan sosial mengingat kehadiran suatu industri yang mengeksploitasi sumber-sumber daya alam setempat tetapi manfaat ekonomisnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.
- c) Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana transportasi. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar jalan darat, baik jalan Kota atau Kabupaten, jalan Provinsi maupun Jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi dalam keadaan kurang mendukung kelancaran arus transportasi dari dan keluar Jambi. Kondisi ini sering menjadi penghambat dalam upaya menarik dana investor asing sebagai akibatnya daerah ini akan mengalami kemajuan ekonomi yang relatif lebih lambat jika

dibandingkan dengan daerah – daerah lain yang lebih kaya dan memiliki infrastruktur yang memadai.

- d) Kurangnya daya dukung perangkat hukum yang ada di Provinsi Jambi. Sampai saat ini Provinsi Jambi masih belum mempunyai perangkat hukum yang jelas berupa Perda maupun keputusan Gubernur sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan penanaman modal di daerah. Belum memadainya Perda atau Keputusan lainnya yang mengatur tentang kewenangan dalam penanaman modal di daerah akan menghambat ruang gerak untuk lebih proaktif dalam kegiatan dan penggalan potensi yang akan diinvestasikan.

B. Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dibutuhkan untuk melihat faktor – faktor yang merupakan peluang dalam memacu peningkatan penanaman modal di daerah dan mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat penanaman modal di daerah. Dari analisis yang dilakukan maka dapat diuraikan beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut ;

Identifikasi dan Analisis Peluang.

- a) Adanya otonomi daerah yang di amanatkan dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang – undang nomor 25 tahun 1999 yang diamandemenkan menjadi Undang-undang 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 33 Tahun 2004, merupakan suatu keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya undang – undang tersebut, daerah dapat secara langsung merumuskan prioritas pembangunan diwilayahnya berdasarkan aspirasi masyarakat. Disisi lain bahwa pemberlakuan undang – undang tersebut memberikan peluang yang cukup besar

kepada daerah dalam meningkatkan penanaman modal di daerah baik dalam negeri maupun luar negeri.

- b) Terbukanya pusat-pusat pertumbuhan regional dan blok - blok perdagangan regional. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru tersebut akan memberikan peluang bagi Provinsi Jambi untuk memperluas peningkatan penanaman modal dan promosi daerah.
- c) Adanya hubungan kerjasama bisnis dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara serta negara-negara lainnya dengan pelaku – pelaku bisnis daerah Jambi (*private to private/ people to people*). Kegiatan ini mempunyai dampak akan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi.
- d) Perkembangan Teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan cepat dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan perseorangan, bisnis maupun penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai sarana untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki daerah ke berbagai penjuru dunia.

Identifikasi dan Analisis Ancaman

- a) Terbukanya pusat pertumbuhan baru dan blok perdagangan baru. Pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini akan menuntut semakin ketatnya persaingan atau *revalery* antar daerah dalam memanfaatkan peluang pasar dan mengundang investor. Pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini merupakan dimensi baru yang dapat merentangkan polarisasi antara daerah kaya dan miskin daerah yang sangat aktif, metropolitan dan berwawasan internasional dengan daerah yang pasif dan tertinggal

serta antara daerah yang bergolak dan daerah yang tenang dan relatif stabil.

- b) Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Ketidakstabilan ini akan berpengaruh pada kondisi keamanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Banyak investor yang telah memulai jalinan investasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pengaruh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kondisi keamanan yang relatif tidak stabil tentunya akan mengalami banyak kesulitan didalam upaya menarik dana investasi asing.
- c) Kebijakan antar daerah yang kadangkala sering bertolak belakang satu sama lainnya sebagai akibat kebutuhan pembangunan dan prioritas masing – masing daerah. Kondisi ini sering mengganggu keharmonisan hubungan investor dan daerah, bahkan dapat mengancam kontinuitas dari investasi yang telah ditanamkan.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini dapat menjadi peluang bagi daerah, akan tetapi karena keterbatasan dana dan sumber daya manusianya, akhirnya perkembangan teknologi ini menjadikan daerah termarginalisasi dan tidak dapat bersaing dengan daerah lain yang mempunyai kemampuan penguasaan informasi secara cepat.

BAB	Isu Strategis Berkaitan
3	Tugas Pokok dan Fungsi BPMD dan PPT

Perekonomian Provinsi Jambi selama periode 2005-2009 telah tumbuh dengan cukup pesat dan bahkan mencapai rata-rata 6,8 persen per tahun. Tingkat capaian ini sesungguhnya merupakan suatu prestasi yang luar biasa mengingat tingkat pertumbuhan ini mampu berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian harus diakui bahwa sebagian besar dari keberhasilan ini disumbangkan oleh sektor konsumsi masyarakat.

Untuk menciptakan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan, dibutuhkan investasi yang besar pula. Oleh karenanya upaya untuk menarik investasi baik domestik maupun asing merupakan suatu kebijakan yang harus mendapat perhatian serius. Seperti telah disebutkan pada bab pendahuluan, bahwa investasi di provinsi Jambi cenderung berfluktuasi baik investasi PMDN maupun investasi PMA. Dilihat dari rencana investasi, meski sempat menurun pada tahun 2008, namun perkembangannya kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2009. Namun demikian, kenaikan rencana investasi tidak diikuti oleh kenaikan realisasi. Disamping nilai realisasinya yang masih relatif kecil (dibawah 30 persen), juga nilainya cenderung menurun sejak tahun 2006.

Sampai saat ini, perkembangan Provinsi Jambi sangat bertumpu pada kemampuan mengeksploitasi sumberdaya alam yang dimilikinya. Terdapat beberapa potensi sumberdaya alam yang belum dikembangkan

secara optimal, baik dilihat dari aspek pemanfaatannya bagi pembangunan daerah/wilayah maupun dilihat dari aspek pembangunan yang berkelanjutan.

3.1. Indetifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas

Pemerintah provinsi Jambi khususnya BPMD dan PPT telah berusaha semaksimal mungkin mendukung program pemerintah provinsi dalam menarik modal swasta, namun demikian minat investasi masuk masih relatif kecil. Kondisi ini selain dipengaruhi oleh faktor eksternal, juga dipengaruhi oleh faktor internal.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan penanaman modal di Provinsi Jambi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan suatu analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut.

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) yang berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

3.1.1 Identifikasi dan Analisis Kondisi Internal

Analisis lingkungan internal dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memacu dan menghambat pelaksanaan penanaman modal di daerah dari sudut faktor internal. Dari sudut faktor internal ini dilakukan analisis terhadap aspek kekuatan dan kelemahan Provinsi Jambi dalam kaitan dengan pelaksanaan penanaman modal di daerah yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Identifikasi dan Analisis Kekuatan.

- a) Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dimana sampai tahun 2008 mencapai angka 2,788 juta jiwa dengan angka pertumbuhan berkisar 1,56 % per tahun. Perkembangan tersebut terlihat mempunyai kecenderungan yang tetap pesat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini memberikan indikasi bahwa Provinsi Jambi memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar dan menunjukkan tingginya konsumen atau pangsa pasar.
- b) Letak geografis Provinsi Jambi yang strategis. Provinsi Jambi terletak pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu, pertumbuhan regional IMT-GT (*Indonesia, Malaysia dan Thailand-Growth Triangle*) dan IMS-GT (*Indonesia, Malaysia dan Singapura – Growth Triangle*). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komperatif jika dibandingkan dengan Provinsi Lain.
- c) Forum koordinasi Gubernur se-wilayah Sumatera. Keanggotaan Provinsi Jambi dalam forum Gubernur se-Wilayah Sumatera akan menciptakan suatu kemajuan bagi Provinsi Jambi yang seimbang dan

saling mengisi dengan Provinsi lainnya. Dengan adanya forum tersebut, masalah-masalah kebutuhan lintas Provinsi yang tidak dapat ditanggulangi oleh Provinsi yang bersangkutan dengan mudah akan dapat teratasi melalui forum koordinasi gubernur dan ini merupakan suatu kekuatan bagi Provinsi Jambi untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal dan promosi daerah.

- d) Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang (batubara, emas, bentonit) serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk dapat menggerakkan roda pembangunan secara mandiri dan efisien, tentunya diperlukan daya dukung sumber daya alam yang memadai. Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Provinsi Jambi.

Identifikasi dan Analisis Kelemahan

- a) Kurangnya sumber dana pembangunan. Salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah daerah harus mampu membiayai jalannya roda pembangunan. Tidak jarang berbagai program penanaman modal di daerah yang telah disepakati tidak dapat berjalan atau terealisasi secara simultan dan terpadu karena keterbatasan anggaran pembangunan.
- b) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai tingkat produktivitas tinggi. Harus diakui bahwa sumber daya manusia yang ada di Provinsi Jambi masih relatif rendah. Hal ini terlihat dari 75 persen penduduk berusia 10 tahun ke atas

berpendidikan paling tinggi Sekolah Dasar. Kondisi ini sering menjadikan para pelaku ekonomi daerah maupun investor asing terpaksa mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari daerah lain bahkan dari luar negeri untuk dapat mengisi kebutuhan dan kekosongan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini sering memicu kerawanan sosial mengingat kehadiran suatu industri yang mengeksploitasi sumber-sumber daya alam setempat tetapi manfaat ekonomisnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.

- c) Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana transportasi. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar jalan darat, baik jalan Kota atau Kabupaten, jalan Provinsi maupun Jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi dalam keadaan kurang mendukung kelancaran arus transportasi dari dan keluar Jambi. Kondisi ini sering menjadi penghambat dalam upaya menarik dana investor asing sebagai akibatnya daerah ini akan mengalami kemajuan ekonomi yang relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan daerah – daerah lain yang lebih kaya dan memiliki infrastruktur yang memadai.
- d) Kurangnya daya dukung perangkat hukum yang ada di Provinsi Jambi. Sampai saat ini Provinsi Jambi masih belum mempunyai perangkat hukum yang jelas berupa Perda maupun keputusan Gubernur sebagai landasan operasional dalam pelaksanaan penanaman modal di daerah. Belum memadainya Perda atau Keputusan lainnya yang mengatur tentang kewenangan dalam penanaman modal di daerah akan menghambat ruang gerak untuk lebih proaktif dalam kegiatan dan penggalan potensi yang akan diinvestasikan.

3.1.2 Identifikasi dan Analisis Kondisi Eksternal

Analisis lingkungan eksternal dibutuhkan untuk melihat faktor – faktor yang merupakan peluang dalam memacu peningkatan penanaman modal di daerah dan mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambat penanaman modal di daerah. Dari analisis yang dilakukan maka dapat diuraikan beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut ;

Identifikasi dan Analisis Peluang.

- a) Adanya otonomi daerah yang di amanatkan dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang – undang nomor 25 tahun 1999 yang di amandemenkan menjadi Undang-undang 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 33 Tahun 2004, merupakan suatu keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan adanya undang – undang tersebut, daerah dapat secara langsung merumuskan prioritas pembangunan diwilayahnya berdasarkan aspirasi masyarakat. Disisi lain bahwa pemberlakuan undang – undang tersebut memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah dalam meningkatkan penanaman modal di daerah baik dalam negeri maupun luar negeri.
- b) Terbukanya pusat-pusat pertumbuhan regional dan blok - blok perdagangan regional. Dengan adanya pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru tersebut akan memberikan peluang bagi Provinsi Jambi untuk memperluas peningkatan penanaman modal dan promosi daerah.

- c) Adanya hubungan kerjasama bisnis dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara serta negara-negara lainnya dengan pelaku – pelaku bisnis daerah Jambi (*private to private/ people to people*). Kegiatan ini mempunyai dampak akan memberikan peluang untuk meningkatkan investasi.
- d) Perkembangan Teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan cepat dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan perseorangan, bisnis maupun penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah sebagai sarana untuk mempromosikan segala potensi yang dimiliki daerah ke berbagai penjuru dunia.

Identifikasi dan Analisis Ancaman

- a) Terbukanya pusat pertumbuhan baru dan blok perdagangan baru. Pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini akan menuntut semakin ketatnya persaingan atau *revalery* antar daerah dalam memanfaatkan peluang pasar dan mengundang investor. Pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini merupakan dimensi baru yang dapat merentangkan polarisasi antara daerah kaya dan miskin daerah yang sangat aktif, metropolitan dan berwawasan internasional dengan daerah yang pasif dan tertinggal serta antara daerah yang bergolak dan daerah yang tenang dan relatif stabil.
- b) Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kurang

menguntungkan. Ketidakstabilan ini akan berpengaruh pada kondisi keamanan yang pada gilirannya akan mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Banyak investor yang telah memulai jalinan investasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena pengaruh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kondisi keamanan yang relatif tidak stabil tentunya akan mengalami banyak kesulitan didalam upaya menarik dana investasi asing.

- c) Kebijakan antar daerah yang kadangkala sering bertolak belakang satu sama lainnya sebagai akibat kebutuhan pembangunan dan prioritas masing – masing daerah. Kondisi ini sering mengganggu keharmonisan hubungan investor dan daerah, bahkan dapat mengancam kontinuitas dari investasi yang telah ditanamkan.
- d) Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan ini dapat menjadi peluang bagi daerah, akan tetapi karena keterbatasan dana dan sumber daya manusianya, akhirnya perkembangan teknologi ini menjadikan daerah termarginalisasi dan tidak dapat bersaing dengan daerah lain yang mempunyai kemampuan penguasaan informasi secara cepat.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Tahun 2010 – 2015.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RINomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian danEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

RPJMD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2010 – 2015 mempunyai visi **Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera 2015 (Jambi EMAS 2015)**. Untuk mendukung pencapaian visi Provinsi Jambi tersebut maka BPMD DAN PPT Provinsi Jambi mempunyai visi : ” **Terdepan Dalam Fasilitas Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Jambi menuju Ekonomi Maju 2015**”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 -2015 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kesetersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama, dan Berbudaya.
3. *Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri.*
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, menempatkan

pembangunan di bidang Perekonomian pada Misi ke-3 (tiga) yaitu "Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri". Dalam mewujudkan Misi tersebut, maka program pembangunan khusus urusan wajib Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi.
- 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- 3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana.
- 4) Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal.

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program tersebut diatas, maka tugas dan fungsi BPMD & PPT Provinsi Jambi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

- 1). Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- 2). Fungsi :
 - Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi BPMD & PPT Provinsi Jambi dan terkait dengan Visi, Misi dan Program Gubernur Jambi, khususnya dalam hal Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan.
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam upaya mensinergikan program dan kegiatan.
4. keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam upaya pengawasan dan pengendalian Perusahaan.

Tabel 3.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPMD dan PPT Provinsi Jambi terhadap Pencapaian

Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

Visi : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera				
No	Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor yang Mempengaruhi	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 3 : Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri. Program : 1) Program Peningkatan Iklim dan Realisasi Investasi. 2) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. 3) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana. 4) Program Peningkatan Pelayanan PM	1. Keterbatasan dana dalam pelaksanaan program, sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan. 2. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menunjang program dan kegiatan. 3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam upaya mensinergikan program dan kegiatan. 4. keterbatasan data dan informasi yang diperoleh dalam upaya pengawasan dan pengendalian Perusahaan.	1) Masih kurang dan sulitnya koordinasi yang dilakukan oleh BPMD dan PPT Provinsi Jambi karena keterbatasan data dan informasi pada tiap Kabupaten/ Kota 2) Kurang dimanfaatkannya sistem informasi manajemen pembangunan secara optimal, sehingga belum terjadi percepatan proses komunikasi timbal balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan 3) Adanya kebijakan-kebijakan baru tidak terakomodir di dalam dokumen perencanaan sehingga program yang telah disepakati menjadi terabaikan	1) Adanya kegiatan RKPPMD (Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang merupakan forum dalam mengakomodasi permasalahan-permasalahan dan menyamakan persepsi antara pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi. 2) Telah disusunnya Pergub. Jambi Nomor 31 Tahun 2008 pada pasal 120 mengenai tugas dan fungsidi dari pada Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD dan PPT)

3.3 Telaahan Renstra K/L

Peningkatan pangsa terhadap pembentukan PDB dalam periode RPJMN tahun 2005-2009 tidak lepas dari capaian kinerja BKPM Pusat dalam melaksanakan Renstra 2005-2009. Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Di samping itu, kinerja BKPM Pusat telah memberikan kontribusi cukup berarti bagi penanganan isu-isu perekonomian nasional, seperti peningkatan daya saing dan pembukaan lapangan kerja. Dalam situasi seperti diuraikan di atas, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat dihadapkan pada tuntutan peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan. Arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha sesuai prioritas nasional membawa pesan perlunya peningkatan kualitas tatakelola dan kinerja BKPM (internal) dan hubungan antar lembaga (eksternal). Lebih jauh RPJMN 2010-2014 mengamanatkan kegiatan prioritas dan prioritas bidang dalam lingkup penanaman modal yang erat kaitannya dengan upaya peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan antar-kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda). Kegiatan prioritas dimaksud meliputi: peningkatan aspek kebijakan penanaman modal, Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE), implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan pengembangan penanaman modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sementara prioritas bidang menyangkut peningkatan harmonisasi kebijakan dan penyederhanaan perizinan dan non perizinan serta peningkatan fasilitasi .

Agenda lima tahun ke depan yang dihadapi BKPM Pusat tersebut di atas disadari bukanlah tugas yang ringan, mengingat implementasi tugas koordinasi antar-K/L dan daerah sejauh ini disadari belum sepenuhnya berjalan. Mengingat hal tersebut, ada beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh SKPD dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Keterbatasan dana dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Program dan Kegiatan.
3. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas guna peningkatan produktivitas dan kinerja Aparatur secara optimal.

Melihat permasalahan diatas, BPMD & PPT berupaya untuk lebih mengoptimalkan dan memberdayakan segenap kemampuan dan potensi yang ada dalam upaya mensukseskan visi, misi dan program yang dicanangkan Gubernur Jambi, khususnya dalam hal “Peningkatan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat berbasis Agribisnis dan Agroindustri “, dengan mengimplementasikan program-program yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 -2015 dengan kegiatan – kegiatan secara tepat guna dan tepat sasaran.

Tabel 09

Permasalahan Pelayanan BPMD dan PPT Provinsi Jambi berdasarkan Sasaran Renstra BKPM

beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Pelaksanaan

Sasaran Jangka Menengah Renstra BKPM	Permasalahan Pelayanan BPMD dan PPT Provinsi Jambi	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
1. Peningkatan aspek kebijakan penanaman modal,	1. Terdapat beberapa Kebijakan di tingkat Pusat yang saling tumpang tindih, sehingga terjadi mispersepsi dalam menerjemahkan dan melaksanakan peraturan tersebut	1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi baik dan akuntabel	1. Adanya upaya PEMDA Kabupaten/ Kota untuk memberikan kepastian hukum untuk perkembangan penanaman modal melalui peraturan kebijakan perencanaan strategis kabupaten/kota dan perencanaan strategis SKPD
2. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE),	2. Keterbatasan sarana dalam upaya pengembangan dan peningkatan pelayanan penanaman modal.	2. Belum terpenuhinya kebutuhan ragam data dan informasi statistik dari instansi terkait terutama untuk wilayah kecil, termasuk data mikro	2. Terbinanya kerjasama yang baik antara pihak swasta/ perusahaan dalam upaya pelaporan data
3. Implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP),	3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Program dan		

dan	Kegiatan.		perusahaan.
4. Pengembangan penanaman modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).	4. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas guna peningkatan produktivitas dan kinerja Aparatur secara optimal.		

3.4 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Dalam pembangunan kedepannya penanaman modal lebih diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penanaman modal hendaknya tidak menjadi ancaman ketika dominasi asing dalam perekonomian sudah terlalu besar, sehingga akan menggeser kekuatan pelaku ekonomi domestik. Untuk itulah dukungan regulasi begitu krusial. Masyarakat jangan dibiarkan hanya menjadi penonton atas perkembangan kegiatan penanaman modal yang ada di wilayahnya. Disadari pula bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Lemahnya implementasi RTRW di Indonesia membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM yaitu pangan, energi, dan infrastruktur perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan. Alasannya sederhana, negara agraris di dunia ini sangat terbatas sehingga potensi agribisnis akan sangat prospektif. Untuk itu harus ada kebijakan lahan pertanian abadi. RTRW harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan. Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal. Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai.

Di tingkat daerah masih banyak ditemui fakta adanya kesulitan dalam memulai usaha. Banyak “biaya siluman” yang harus dikeluarkan untuk berbisnis, baik di lingkungan birokrasi pemerintah maupun nonpemerintah. Penanam modal *dijejali* berbagai peraturan yang perubahannya begitu cepat. Peraturan Daerah (Perda) berubah seiring dengan pergantian kepala daerah. Hambatan penanaman modal semakin menjadi-jadi. Permasalahan di daerah semakin rumit ketika diimplementasikannya otonomi daerah. Daerah berlomba-lomba memacu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang secara langsung maupun tidak langsung menciptakan ekonomi biaya tinggi.

Permasalahan sektoral penanaman modal selama ini juga terkait dengan minimnya penguasaan teknologi. Teknologi pada sejumlah industri masih tradisional. Penguasaan teknologi di Indonesia masih rendah, dari

mulai tahapan produksi hingga pemasaran produk. Ini menyebabkan nilai tambah produk relatif kecil. Penerapan teknologi dapat diadopsi dari kegiatan PMA. Namun, kita cenderung lambat dalam memanfaatkan berbagai peluang yang ada. Di sisi lain, pemetaan potensi asli daerah semakin mendesak dilakukan, terutama menyangkut bagaimana pemanfaatannya secara maksimal.

Menyangkut kegiatan penanaman modal di daerah, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang. Dalam kaitannya dengan ketimpangan sektoral dan regional, inisiasi pemerintah dalam membentuk KEK menjadi salah satu upaya mengurangi ketimpangan penanaman modal regional. Pemerintah harus mulai memikirkan pembukaan KEK di luar Jawa untuk mengurangi konsentrasi penduduk Jawa, sekaligus untuk membuka peluang penanaman modal. Selain itu, perlunya meningkatkan PTSP sebagai upaya untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan penanaman modal.

Tabel 10

Permasalahan Pelayanan BPMD dan PPT Provinsi Jambi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi BPMD dan PPT	Permasalahan Pelayanan BPMD dan PPT	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1. Pengembangan struktur ruang yang lebih efisien melalui pembangunan prasarana transportasi ke arah sentra-sentra produksi sebagai penghasil sumber daya primer 2. Penetapan kawasan-kawasan potensial sebagai kawasan lindung dan kawasan pengembangan budidaya pertanian/non pertanian	1. Adanya kebijakan/program-program baru yang mengharuskan struktur ruang yang telah disusun harus direvisi kembali 2. Ketidaksinkronan antara rencana tata ruang dengan pihak yang mempunyai kewenangan pemberian izin pemanfaatan ruang	1. Minimnya data dan informasi pendukung yang terkait dengan tata ruang 2. Terbatasnya SDM perencanaan yang memiliki kompetensi di dalam penyusunan dokumen rencana tata ruang 3. Adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Usulan Perubahan Kawasan Hutan	1. Adanya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang 2. Adanya peraturan penyusunan dokumen perencanaan yang harus mengacu kepada RTRW

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

Banyak isu-isu strategis yang selama ini menjadi factor penghambat dan harus diatasi baik secara internal BPMD & PPT Provinsi Jambi maupun lingkungan eksternal, antara lain:

1. Di tengah tuntutan akan peningkatan koordinasi dan harmonisasi kebijakan, secara internal BPMD dan PPT Provinsi Jambi menyadari

masih terdapat kelemahan kualitas sumberdaya manusia untuk menopang kualitas kajian dan perumusan kebijakan secara teknokratik dan visioner. Dinamika kegiatan penanaman modal, perdagangan dan keuangan berjalan secara cepat dan terus berubah.

2. Peran BPM& PPT Provinsi Jambi sebagai perumus kebijakan di bidang penanaman modal belum sepenuhnya direspons secara proaktif oleh instansi teknis dan Pemda. Usulan/kajian kebijakan yang dilakukan BPMD & PPT Provinsi Jambi belum menjadi salah satu pertimbangan penting bagi penetapan produk-produk kebijakan instansi/daerah di bidang penanaman modal.
3. Dalam upaya meningkatkan daya saing dan iklim usaha, indikator-indikator yang menentukan sesungguhnya lebih banyak terletak pada otoritas teknis. Artinya, bila masih terdapat tumpang tindih kewenangan dan kepentingan, maka arah peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha akan sulit dicapai. Diharapkan, sistem PTSP dapat mengatasi persoalan ini, dimana setiap otoritas teknis dapat melimpahkan tugas dan kewenangannya kepada BPMD & PPT Provinsi Jambi.
4. Belum terciptanya integritas kebijakan di bidang penanaman modal yang di antaranya disebabkan terbatasnya otoritas BPMD & PPT Provinsi Jambi. Minimnya integritas kebijakan penanaman modal dapat diamati dari banyaknya peraturan pusat maupun daerah yang tidak sejalan dengan arah pengembangan penanaman modal. Kondisi tersebut semakin jelas ketika menjamurnya Perda.
5. Di luar isu yang berkaitan dengan kelembagaan dan kualitas sumberdaya internal BPMD & PPT Provinsi Jambi seperti disebutkan di atas,

kelemahan mendasar sektor penanaman modal terletak pada kinerja makroekonomi nasional itu sendiri. Bahwa pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dinilai belum meletakkan fondasi yang kuat bagi kelangsungannya dalam jangka panjang.

BAB
4

**Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran Strategis dan
Arah Kebijakan**

4.1 Visi dan Misi

RPJMD Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2010 – 2015 mempunyai visi **Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera 2015 (Jambi EMAS 2015)**. Untuk mendukung pencapaian visi Provinsi Jambi tersebut maka BPMD DAN PPT Provinsi Jambi mempunyai visi : ” **Terdepan Dalam Fasilitas Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Jambi menuju Ekonomi Maju 2015**”

Untuk mencapai visi tersebut maka BPMD DAN PPT Provinsi Jambi mempunyai beberapa misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola administrasi kantor untuk mencapai efisiensi efektifitas dan kenyamanan kerja.
2. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitas penanaman modal di Provinsi Jambi.
3. Meningkatkan pengembangan dan kerjasama penanaman modal untuk dapat mentransformasikan segala potensi daerah Jambi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata secara efektif dan efisien.
4. Meningkatkan promosi peluang investasi serta produk unggulan Provinsi Jambi di dalam dan luar negeri.

-
5. Meningkatkan pelayananan penanaman modal sesuai dengan kewenangan Provinsi.
 6. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal pada perusahaan fasilitas dan non fasilitas sesuai dengan kewenangan Provinsi.

4.2 Tujuan dan Sasaran.

Tujuan menggambarkan keadaan yang ingin dicapai oleh BPMD Dan PPT PROVINSI JAMBI dalam jangka waktu lima tahun ke depan, secara spesifik tujuan Renstra BPMD Dan PPT Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan tata kelola administrasi kantor dengan pelayanan optimal, efektif. nyaman dan transparan.
2. Peningkatkan kegiatan penanaman modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.
3. Mendorong pengembangan penanaman modal untuk terciptanya diversifikasi bidang usaha, produk dan jasa sehingga memperluas lapangan kerja.
4. Terjalannya kerjasama penanaman modal antara dunia usaha dalam dan luar negeri untuk mendorong realisasi penanaman modal di daerah.
5. Terpromosikannya peluang investasi serta produk unggulan Provinsi Jambi untuk meningkatkan minat calon investor dari dalam dan luar negeri

-
6. Terkendalinya dan terbinanya pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada perusahaan PMA/PMDN, BUMN/BUMD dan perusahaan non fasilitas sesuai dengan kewenangan Provinsi.
 7. Meningkatnya fasilitasi pelayanan penanaman modal perusahaan PMA/PMDN, BUMN/BUMD dan perusahaan non fasilitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut, sasaran strategis yang merupakan ukuran-ukuran spesifik menjelaskan sejauh mana tujuan itu ingin dicapai BPMD dan PPT Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2010-2015 sebagai berikut :

- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang handal dalam tata kelola administrasi kantor dengan pelayanan optimal efektif dan akuntabel.
- Terwujudnya realisasi penanaman modal perusahaan fasilitas dan non fasilitas.
- Terrealisasinya Pengembangan dan kerjasama penanaman modal perusahaan fasilitas dan non fasilitas.
- Tercapainya penanaman modal baru perusahaan PMDN/PMA, BUMN/BUMD dan non fasilitas.
- Terwujudnya pelayanan perijinan penanaman modal perusahaan fasilitas dan non fasilitas yang efisien.
- Terkendalinya dan terbinanya penanaman modal perusahaan PMDN/PMA, BUMN/BUMD dan non fasilitas.

Tabel.8. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Saran

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD						
kegiatan dalam Fasilitas Peningkatan Penanaman Modal dan Daya Saing Jambi Menuju Ekonomi Maju 2015"						
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET K	
					PADA	
					1	2
Meningkatkan Kualitas SDM dan Tata Kelola Administrasi Kantor untuk mencapai efesiensi, efektifitas, kenyamanan kerja						
Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dalam bidang Administrasi Perkantoran.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran	Memberikan pemahaman kepada aparatur tentang pentingnya kualitas pelayanan	Pembinaan dan pelatihan Aparatur	Persentase Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar	95%	95%
Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Fasilitas PM di Prov. Jambi						
Meningkatkan Kegiatan PM utk mendorong pertumbuhan ekonomi di Prov. Jambi	Terwujudnya realisasi PM perusahaan fasilitas dan non fasilitas	Memberikan kemudahan informasi investasi bagi para calon investor	Penyediaan data investasi di Prov. Jambi	Persentase meningkatnya Penanaman Modal	80%	80%
Meningkatkan Pengembangan dan kerjasama PM untuk dapat mentranformasikan segala potensi daerah Jambi menjadi kekuatan ekonomi yang efisien						
Meningkatkan kerjasama dan Pengembangan Penanaman Modal mendorong realisasi Penanaman Modal di daerah	Terealisasinya pengmbangan dan kerjasama penanaman modal perusahaan fasilitas dan non fasilitas	Memberikan kemudahan penyediaan sarana dan prasarana pendukung	Penyediaan fasilitas penunjang guna peningkatan investasi	Persentase meningkatnya kerjasama penanaman modal	85%	90%
Meningkatkan Promosi Peluang investasi serta produk unggulan daerah Jambi di dalam dan luar negeri						
Mempromosikan peluang investasi produk unggulan Prov. Jambi menarik minat investor dalam dan luar negeri	Terpromosinya peluang investasi serta produk unggulan dan meningkatnya investor ke Prov. Jambi	Memberikan informasi yang uptodate mengenai peluang investasi di Prov. Jambi	penyediaan data peluang investasi dan produk unggulan Jambi	Persentase meningkatnya Promosi Produk unggulan	85%	90%
Meningkatkan pelayanan PM sesuai dengan kewenangan Provinsi.						
Meningkatkan fasilitas pelayanan penanaman modal PMA/ PMDN perusahaan Non Fasilitas meningkatkan daya saing.	Terwujudnya pelayanan perizinan PM perusahaan Non Fasilitas dan Fasilitas yang efesiensi.	Memberikan kemudahan pelayanan perizinan kepada calon investor	penyederhanaan prosedur pelayanan dan perizinan perusahaan	Jumlah perizinan dan non Perizinan yang terlaksana	23 Jenis perizinan	23 Jenis perizinan
Meningkatkan pengendalian Pelaksanaan PM pada perusahaan fasilitas dan non fasilitas						

Visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan

a dan mengawasi aan kegiatan penanaman ada PMA/ PMDN dan aan Non fasilitas sesuai kewenangan Provinsi.	Terkendali dan terbinanya Penanaman Modal perusahaan PMA/ PMDN dan Non Fasilitas	Memberikan pemahaman kepada Perusahaan PMA/ PMDN	Pembinaan dan pengawasan Perusahaan PMA/ PMDN	Persentase meningkatnya Pengawasan dan Pembinaan PMA/ PMDN	85%	85%
--	---	---	--	---	-----	-----

4.3 Strategi & Arah Kebijakan

a) Strategi

Untuk mewujudkan sasaran di atas diperlukan strategi yang dapat menggairahkan peningkatan investasi di Provinsi Jambi melalui berbagai upaya diantaranya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas aparatur pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada investor dengan cara mengubah pemahaman (*mindset*) aparatur dari dilayani menjadi melayani.
2. Menerapkan sistem Pelayanan Perijinan Terpadu sehingga tercipta pelayanan yang mudah, efektif, transparan dan akuntabel.
3. Memperkuat data peluang investasi yang prospektif untuk dikembangkan.
4. Memanfaatkan kerjasama IMT-GT, IMS-GT dan ACFTA untuk menangkap peluang investasi sehingga masuk ke daerah Jambi.
5. Promosi peluang investasi yang terencana dengan memperkuat basis data di website BPMD Dan PPT serta menggalakan temu usaha dengan calon investor potensial di dalam dan luar negeri.
6. Menjamin kepastian berusaha dengan merespon dan menyelesaikan secara cepat setiap kondisi yang berpotensi menciptakan konflik baik itu berkaitan dengan kebijakan maupun perselisihan lainnya.
7. Merancang dan menerbitkan peraturan daerah yang mampu memberikan kemudahan berinvestasi di provinsi Jambi.

-
8. Memberikan insentif yang menarik bagi para penanaman modal di Provinsi Jambi.

b). Kebijakan

Kebijakan dan strategi BPMD dan PPT Provinsi Jambi ini memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif untuk memecahkan berbagai permasalahan strategis dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti dalam jangka menengah guna tercapainya visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BPMD dan PPT Provinsi Jambi tahun 2010-2015.

Adapun kebijakan yang akan dilaksanakan BPMD dan PPT Provinsi Jambi dalam kurun waktu 2010-2015 tergambar pada program-program indikatif sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

Sasaran Program adalah :

- Tersedianya data informasi investasi daerah yang upto date untuk pengembangan Investasi Provinsi Jambi.
- Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT).
- Terlaksananya Koordinasi yang baik antar lembaga dan instansi dalam pengendalian pelaksanaan investasi Dalam Provinsi Jambi.
- Meningkatnya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
- Terlaksananya Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jambi, Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi.

-
- Terselenggaranya Pameran dan Temu usaha di Dalam Negeri, SPC Batam dan Luar Negeri.

2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Sasaran Program adalah :

- Tersusunnya kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur dan Master Plan pengembangan penanaman modal.
- Terlaksananya Pengembangan sistem informasi penanaman modal.
- Terlaksananya Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal.
- Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi Kemudahan dan Sosialisasi Peraturan terkait Penanaman Modal.
- Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan pelaporan.

3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana.

Sasaran Program adalah :

- Tersedianya proposal peluang investasi penanaman modal.

4. Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

- Terlaksananya Pelayanan prima pada perizinan penanaman Modal

BAB 5	Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok, dan Pendanaan Indikatif
------------------------	---

5.1 Program dan Kegiatan Pokok.

Untuk mencapai arah dan kebijakan Penanaman Modal di Provinsi Jambi, program dan kegiatan penanaman modal di Provinsi Jambi harus searah dengan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015, dengan Program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Tujuan

- Meningkatkan kerjasama investasi dengan lebih memperkenalkan Provinsi Jambi sebagai salah satu tujuan utama investasi di Indonesia.

b. Sasaran

- Meningkatnya promosi dan kerjasama investasi di Provinsi Jambi.

c. Indikator Sasaran

- Penyediaan informasi peluang investasi yang potensial di Provinsi Jambi.

d. Indikator Kinerja Program

- Tersedianya informasi peluang investasi yang potensial di Provinsi Jambi.

Dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Peningkatan kerjasama strategis (Kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah.
 - a. Tujuan : Melaksanakan kegiatan temu usaha kemitraan antara usaha kecil, menengah dan koperasi, dengan usaha besar.
 - b. Sasaran : Terlaksananya kegiatan temu usaha kemitraan antara usaha kecil, menengah dan koperasi, dengan usaha besar.
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyediaan data dan informasi mitra usaha potensial untuk pengembangan PM.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya data dan informasi mitra usaha potensial untuk pengembangan PM
2. Pengembangan potensi unggulan daerah.
 - a. Tujuan : Meningkatkan Pengembangan Potensi unggulan daerah
 - b. Sasaran : Terinventarisirnya potensi unggulan, peluang investasi & sarana pendukung
 - c. Indikator sasaran :
 - Penyediaan informasi potensi, peluang investasi unggulan
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya informasi potensi, peluang investasi unggulan

-
3. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT).
 - a. Tujuan : Meningkatkan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal
 - b. Sasaran : Meningkatnya koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal
 - c. Indikator Sasaran :
 - Pelaksanaan koordinasi dan pembangunan kawasan tertinggal.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Terlaksananya koordinasi terkait percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal
 4. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA.
 - a. Tujuan : Meningkatkan koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan investasi
 - b. Sasaran : Meningkatnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan investasi
 - c. Indikator Sasaran :
 - Pelaksanaan koordinasi antar lembaga pelaksana investasi
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian investasi PMA/ PMDN.
 5. Fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.

-
- a. Tujuan : Meningkatkan koordinasi perencanaan & pengembangan PM.
 - b. Sasaran : Meningkatnya koord. & kerjasama dibidang perencanaan & pengembangan PM
 - c. Indikator Sasaran :
 - Pelaksanaan kegiatan RKPPMD kab/kota & kegiatan PM lainnya
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Terlaksananya kegiatan RKPPMD TK Provinsi, mengikuti kegiatan RKPPMD kab/ kota, KP3MR, KP3MN, & IMT-GT
6. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah.
- a. Tujuan : Meningkatkan pengawasan & Evaluasi Kinerja aparatur BPMD
 - b. Sasaran : Meningkatnya pengawasan & Evaluasi Kinerja aparatur BPMD
 - c. Indikator Sasaran :
 - Pelaksanaan Pengawasan dan mengevaluasi kinerja aparatur
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Terlaksananya pengawasan & Evaluasi Kinerja aparatur BPMD
7. Inventarisasi Potensi investasi Daerah Tertinggal.
- a. Tujuan : Meningkatkan Peluang investasi daerah tertinggal
 - b. Sasaran : Meningkatnya Potensi investasi daerah tertinggal.
 - c. Indikator Sasaran :
 - Mengoptimalkan potensi investasi yang dimiliki daerah tertinggal.

-
- d. Indikator Kinerja Program :
- Tersedianya data potensi investasi daerah tertinggal.
8. Penyelenggaraan Pameran dan Temu usaha di Dalam Negeri.
- a. Tujuan : Meningkatkan promosi produk unggulan provinsi Jambi
- b. Sasaran : Meningkatnya kerjasama investasi melalui pameran & temu usaha di dalam negeri
- c. Indikator Sasaran:
- Pelaksanaan pameran untuk meningkatkan Promosi Prov. Jambi
- d. Indikator Kinerja Kegiatan :
- Terlaksananya pameran di dalam negeri
9. Kegiatan Pameran dan temu Usaha di Luar Negeri.
- a. Tujuan : Meningkatkan promosi produk unggulan provinsi Jambi
- b. Sasaran : Meningkatnya kerjasama investasi melalui pameran & temu usaha di luar negeri.
- c. Indikator Sasaran:
- Pelaksanaan pameran untuk meningkatkan Promosi Prov. Jambi
- d. Indikator Kinerja Kegiatan :
- Terlaksananya pameran di luar negeri
10. Sumatera promotion Centre (SPC) Batam.
- a. Tujuan : Meningkatkan promosi & kerjasama investasi di Provinsi Jambi.

-
- b. Sasaran : Meningkatnya koord. & kerjasama promosi se-Sumatera
 - c. Indikator Sasaran :
 - Pelaksanaan kegiatan promosi se-Sumatera
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Terlaksananya kegiatan promosi se-Sumatera
11. Pembuatan Video Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi.
- a. Tujuan : Meningkatkan peluang investasi Provinsi Jambi
 - b. Sasaran : Meningkatnya peluang investasi Provinsi Jambi
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyusunan Video profile peluang investasi unggulan daerah.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya profile peluang investasi di Provinsi Jambi
12. Kegiatan Pembentukan Tim Promosi Investasi Terpadu
- a. Tujuan : Meningkatkan promosi investasi di Prov. Jambi
 - b. Sasaran : Meningkatnya promosi investasi di Prov. Jambi
 - c. Indikator Sasaran :
 - Pelaksanaan Promosi investasi yang efektif dan strategis
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Terbentuknya tim promosi investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Dengan Beberapa Kegiatan sebagai berikut

1. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.
 - a. Tujuan : Meningkatkan investasi & pembangunan fasilitas infrastruktur.
 - b. Sasaran : Meningkatnya Investasi & Pembangunan fasilitas infrastruktur.
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyusunan kebijakan investasi guna pembangunan fasilitas infrastruktur.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya kebijakan investasi guna pembangunan infrastruktur.
2. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal.
 - a. Tujuan : Meningkatkan investasi terkait pengembangan PM
 - b. Sasaran : Meningkatnya investasi terkait pengembangan PM
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyediaan data terkait penyusunan cetak biru pengembangan PM
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya data terkait penyusunan cetak biru pengembangan PM
3. Pengembangan sistem informasi penanaman modal.
 - a. Tujuan : Adanya kemudahan akses informasi PM

-
- b. Sasaran : Terlaksananya pengembangan sistem informasi
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyediaan data informasi yang upto date
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya sistem informasi penanaman modal
4. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM.
- a. Tujuan : Meningkatkan kegiatan PM perusahaan PMA/PMDN di Prov. Jambi
 - b. Sasaran : Meningkatnya kegiatan PM perusahaan PMA/PMDN.
 - c. Indikator Sasaran :
 - Pembinaan & Pengawasan PMA/ PMDN di Prov. Jambi
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Terlaksananya pemantauan, pembinaan, & pengawasan PM
5. Kajian kebijakan penanaman modal melalui RUPM
- a. Tujuan : Meningkatkan kemudahan prosedur penanaman modal
 - b. Sasaran : Meningkatkan kemudahan prosedur penanaman modal
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyusunan kebijakan penanaman modal
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya kebijakan penanaman modal
6. Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal.
- a. Tujuan : Meningkatkan investasi di wilayah tertinggal

-
- b. Sasaran : Meningkatnya investasi di wilayah tertinggal
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyediaan data dan informasi investasi wilayah tertinggal
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - tersedianya data dan informasi investasi wilayah tertinggal
7. Fasilitasi Kemudahan dan Sosialisasi Peraturan terkait PM
- a. Tujuan : Mensosialisasikan peraturan terkait penanaman modal kepada pengusaha dan aparatur pemerintah
 - b. Sasaran : Tersosialisasinya peraturan terkait penanaman modal kepada pengusaha dan aparatur pemerintah
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyediaan rancangan kajian akademik tentang kemudahan investasi
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya kemudahan prosedur perizinan & meningkatnya PM.
8. Koordinasi Pembinaan Perizinan PM & PTSP di Provinsi Jambi.
- a. Tujuan : Meningkatkan koordinasi pembinaan perizinan PM.
 - b. Sasaran : Meningkatnya pelayanan perizinan yang prima
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyediaan kemudahan pelayanan perizinan PM
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Tersedianya kemudahan pelayanan perizinan PM

9. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Konsumen

- a. Tujuan : Mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
- b. Sasaran : Meningkatnya minat masyarakat/ konsumen untuk berinvestasi
- c. Indikator Sasaran :
 - Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai
- d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Teridentifikasinya tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan perizinan

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Proposal Peluang investasi.
 - a. Tujuan : Meningkatkan potensi sumberdaya investasi.
 - b. Sasaran : Meningkatnya potensi sumberdaya investasi
 - c. Indikator Sasaran :
 - Penyediaan data potensi sumberdaya investasi.
 - d. Indikator Kinerja Kegiatan :
 - Penyediaan data potensi sumberdaya investasi
2. Penyusunan Sistem Informasi PM dan Buku Profile Potensi Investasi
 - a. Tujuan : Meningkatkan potensi sumberdaya investasi.
 - b. Sasaran : Meningkatnya potensi sumberdaya investasi

c. Indikator Sasaran :

- Penyediaan data potensi sumberdaya investasi.

d. Indikator Kinerja Kegiatan :

- Tersedianya informasi yang up to date mengenai potensi investasi Jambi

Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.

a. Tujuan : Meningkatkan pelayanan perizinan PM yg cepat, tepat & prima.

b. Sasaran : Meningkatnya kemudahan prosedur pelayanan perizinan PM

c. Indikator Sasaran :

- Penyusunan prosedur pelayanan perizinan PM yang mudah.

d. Indikator Kinerja Kegiatan :

- Tersusunnya prosedur pelayanan perizinan PM yang mudah

5.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

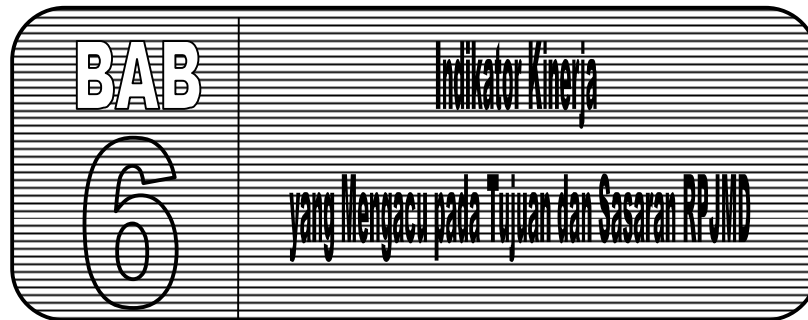
Kelompok sasaran program dan kegiatan BPMD & PPT Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 sebagian besar berada di Provinsi Jambi dengan menggunakan pendanaan indikatif yang berasal dari anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi. (lihat Tabel. 9)

**Tabel. 9. ALOKASI ANGGARAN KEGIATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI**

No	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran						Lokasi Pelaksanaan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	4	5	6	7	8	9	10
	Program :							
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
	Kegiatan :							
	Kegiatan Peningkatan kerjasama strategis (Kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah	200	200	250	250	250	300	Provinsi Jambi
	Pengembangan potensi unggulan daerah				200	250	250	Provinsi Jambi
	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT).				250	250	250	Provinsi Jambi
	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA				250	250	250	Provinsi Jambi
	Fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	300	300	300	300	350	350	Provinsi Jambi
	Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal Daerah				300	300	350	Provinsi Jambi
	Inventarisasi potensi investasi daerah tertinggal		200		200	200	250	Provinsi Jambi
	Penyelenggaraan Pameran dan Temu usaha di Dalam Negeri.	500	550	550	550	600	650	Provinsi Jambi

	Kegiatan Pameran dan temu Usaha di Luar Negeri	350	350	350	350	400	400	Provinsi Jambi
	Sumatera Promotion Centre (SPC).	300			350		350	Provinsi Jambi
	Pembuatan video profile peluang investasi Prov. Jambi			250	250	300	350	Provinsi Jambi
	Kegiatan Pembentukan Tim Promosi Investasi Terpadu				200	200	300	Provinsi Jambi
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							Provinsi Jambi
	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.				250	250	250	Provinsi Jambi
	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal				300	300	300	Provinsi Jambi
	Pengembangan sistem informasi penanaman modal.					350	350	Provinsi Jambi
	Peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan PM	300	300	350	350	400	400	Provinsi Jambi
	Kajian kebijakan penanaman modal (RUPM)					300	300	Provinsi Jambi
	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal.				300			Provinsi Jambi
	Fasilitasi Kemudahan dan Sosialisasi Peraturan terkait PM	250				300	350	Provinsi Jambi

	Koordinasi Pembinaan Perizinan PM & PTSP di Provinsi Jambi	350	350	350	350	400	400	Provinsi Jambi
	Survei Indeks Kepuasan Konsumen				300	400	500	Provinsi Jambi
3	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana.							
	Penyusunan Proposal Peluang Investasi		200			350	350	Provinsi Jambi
	Penyusunan Sistem Informasi (Master) PM dan Buku Profile Potensi Investasi	300	300	350	350	400	400	
4	Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal							
	Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal				250	300	350	Provinsi Jambi
	Jumlah							



Berdasarkan Pedoman Penyusunan Renstra yang dikeluarkan Bappenas (2009), tujuan menunjukkan *impact* atau kinerja, sedangkan sasaran strategis menunjukkan indikator kinerja. Dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, maka disusunlah Program dan Kegiatan BPMD dan PPT Provinsi Jambi tahun 2010-2015 sebagai berikut:

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan yang dilaksanakan :

1. Kegiatan Peningkatan kerjasama strategis (Kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah.

Indikator Kinerja kegiatan sebagai berikut :

Output : Tersedianya data dan informasi mitra usaha potensial untuk pengembangan PM

2. Pengembangan potensi unggulan daerah.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya informasi potensi, peluang investasi unggulan.
3. Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT).
 - Indikator Kinerja : Terlaksananya koordinasi terkait percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal.

4. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA.
 - Indikator Kinerja : Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian investasi PMA/PMDN.
5. Fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha.
 - Indikator Kinerja : Terlaksananya kegiatan RKPPMD Tingkat Provinsi.
6. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah.
 - Indikator Kinerja : Terlaksananya pengawasan & evaluasi kinerja aparatur.
7. Inventarisasi Potensi investasi Daerah Tertinggal.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya data potensi investasi daerah tertinggal.
8. Penyelenggaraan Pameran dan Temu usaha di Dalam Negeri.
 - Indikator Kinerja : Terlaksananya Pameran dalam negeri.
9. Kegiatan Pameran dan temu Usaha di Luar Negeri.
 - Indikator Kinerja : Terlaksananya Pameran di luar negeri.
10. Sumatera promotion Centre (SPC) Batam.
 - Indikator Kinerja : Terlaksananya kegiatan Promosi se- Sumatera.
11. Pembuatan Video Profile Peluang Investasi Provinsi Jambi.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya profile peluang investasi di Provinsi Jambi.
12. Kegiatan Pembentukan Tim Promosi Investasi Terpadu
 - Indikator Kinerja: Terbentuknya tim promosi investasi

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Dengan Beberapa Kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya kebijakan investasi guna pembangunan infrastruktur.
2. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya data terkait penyusunan cetak biru pengembangan PM.
3. Pengembangan sistem informasi penanaman modal.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya sistem informasi penanaman modal.
4. Peningkatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM
 - Indikator Kinerja : Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan pengawasan PM.
5. Kajian kebijakan penanaman modal.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya kebijakan penanaman modal.
6. Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya data dan informasi investasi wilayah tertinggal.
7. Fasilitasi Kemudahan dan Sosialisasi Peraturan terkait PM
 - Indikator Kinerja : Tersedianya kemudahan prosedur perizinan & meningkatnya PM.

8. Koordinasi Pembinaan Perizinan PM & PTSP di Provinsi Jambi.
 - Indikator Kinerja : Tersedianya kemudahan pelayanan perizinan PM
9. Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Konsumen
 - Indikator Kinerja Kegiatan : Teridentifikasinya tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan perizinan

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana.

Dengan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Proposal Peluang Investasi.
 - Indikator Kinerja : Penyediaan data potensi sumber daya investasi.
2. Penyusunan Sistem Informasi PM dan Buku Profile Potensi Investasi
 - Indikator Kinerja : Tersedianya informasi yang up to date mengenai potensi investasi Jambi

Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
 - a. Indikator Kinerja : Tersedianya kemudahan prosedur pelayanan dan perizinan PM.

BAB **7** | **Penutup**

Rencana Strategis BPMD dan PPT Provinsi Jambi tahun 2010-2015 ini sebagai pedoman BPMD dan PPT dalam mencapai visi yang ditetapkan melalui Program dan Kegiatan juga ditetapkan. Rencana Strategis BPMD dan PPT disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi 2010 – 2015 serta Visi Misi Gubernur Jambi 2010-2015. Mengenai substansi dan muatan rencana strategis ini dibatasi hanya pada program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilakukan di Provinsi Jambi dan dibiayai oleh APBD dan APBN serta Swasta.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan adanya konsistensi perencanaan dalam penanaman modal di daerah dengan pemilihan program dan kegiatan yang memungkinkan untuk dilaksanakan daerah sesuai dengan kebutuhan. Rencana Strategis ini juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja BPMD dan PPT Provinsi Jambi kedepan dalam kurun waktu 2010-2015.

Diharapkan adanya keinginan yang kuat dari pelaku pembangunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dirancang. Oleh karena itu keberhasilan dari pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran yang kuat dari segenap *stakeholders* pembangunan dan peran pemerintah sebagai fasilitator pembangunan.

LAMPIRAN : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI JAMBI

INDIKATOR	Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal Priode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Outcome:	Program :								
tersedianya informasi peluang investasi yang potensial di Provinsi Jambi.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi								
Output :	Kegiatan :								
Tersedianya data dan informasi mitra usaha potensial untuk pengembangan PM	Kegiatan Peningkatan kerjasama strategis (Kemitraan) untuk pengembangan investasi dan pemutakhiran data informasi investasi daerah	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota		3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota	3 Kab/ Kota
Tersedianya informasi potensi, peluang investasi unggulan	Pengembangan potensi unggulan daerah					50 CD & 50 Buku		50 CD & 50 Buku	
Terlaksananya koordinasi terkait percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal	Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawasan produksi daerah tertinggal (P2KPDT).						11 Kab/ Kota		
Terlaksananya koordinasi antar lembaga dalam pengendalian investasi PMA/ PMDN	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA					11 Kab/ Kota			
Terlaksananya kegiatan RKPPMD TK Provinsi, mengikuti kegiatan RKPPMD kab/ kota, KP3MR, KP3MN, & IMT-GT	Fasilitasi koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	1 Keg.	1 Keg.					1 Keg.	1 Keg.
Terlaksananya pengawasan & Evaluasi Kinerja aparatur BPMD	Pengawasan dan evaluasi kinerja aparatur Badan Penanaman Modal Daerah						2 Keg		
Terdatanya Potensi Investasi Daerah Tertinggal	Inventarisasi Potensi Investasi Daerah Tertinggal			2 Keg				2 Keg	2 Keg
Terlaksananya pameran di dalam negeri	Penyelenggaraan Pameran dan Temu usaha di Dalam Negeri.	10 even	10 even	10 even	10 even	10 even	10 even	10 even	10 even
Terlaksananya pameran di luar negeri	Kegiatan Pameran dan temu Usaha di Luar Negeri	2 even	2 even	2 even	2 even	2 even	2 even	2 even	2 even
Terlaksananya kegiatan promosi se-Sumatera	Sumatera Promotion Centre (SPC).	1 even	1 even			1 even		1 even	1 even
Tersedianya profile peluang investasi di Provinsi Jambi	Pembuatan video profile peluang investasi Prov. Jambi				100 CD		100 CD		

Terwujudnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi								
Tersedianya kebijakan investasi guna pembangunan infrastruktur	Penyusunan kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur.					1 Paket			
Tersedianya data terkait penyusunan cetak biru pengembangan PM	Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal					1 Paket		1 Paket	1 Paket
Tersedianya sistem informasi penanaman modal	Pengembangan sistem informasi penanaman modal.						1 Paket		
Terlaksananya pemantauan, pembinaan, & pengawasan PM	Peningkatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan PM	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan	100 Perusahaan
Tersedianya kebijakan penanaman modal	Kajian kebijakan penanaman modal							1 Paket	1 Paket
tersedianya data dan informasi investasi wilayah tertinggal	Pemberian insentif investasi di wilayah tertinggal.					11 Kab/ Kota			
Tersedianya kemudahan prosedur perizinan & meningkatnya PM	Fasilitasi Kemudahan dan Sosialisasi Peraturan terkait PM	1 Paket					1 Paket		
Tersedianya kemudahan pelayanan perizinan PM	Koordinasi Pembinaan Perizinan PM & PTSP di Provinsi Jambi	23 Jenis Perizinan	23 Jenis Perizinan	23 Jenis Perizinan	23 Jenis Perizinan	23 Jenis Perizinan	23 Jenis Perizinan	23 Jenis Perizinan	23 Jenis Perizinan
Berkembangnya Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana.	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana.								
Penyediaan data potensi sumberdaya investasi	Penyusunan Proposal Peluang Investasi			1 Paket			1 Paket		
Terwujudnya Pelayanan Pebanaman Modal yang Prima	Program Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal								
Tersusunnya prosedur pelayanan perizinan PM yang mudah	Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal					1 Paket			

Jambi, 2011

.KEPALA BPMD & PPT PROVINSI JAMBI

DR.H. SAYID SYEKH, SE, MSi
Pembina Utama Muda
NIP.19560825 199010 1 001.

